

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI TK ISLAM MUTIARA BUNDA SIDOREJO PEKON
MUTAR ALAM KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh

**AWALIA AYU SUKMAWATI
NPM.1711070059**

Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1441H/2020M

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI TK ISLAM MUTIARA BUNDA SIDOREJO PEKON
MUTAR ALAM KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh

**AWALIA AYU SUKMAWATI
NPM.1711070059**

Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

PEMBIMBING I : Dr. Hj. Romlah, M.Pd.I

PEMBIMBING II : Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1441H/2020M

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Anak Usia Dini adalah dengan cara manajemen pembiayaan yang dikelola oleh pihak manajemen sekolah yang memadai, berkualitas yang baik untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan disuatu lembaga selain diperlukannya manajemen sekolah yang baik dn sesuai dengan anak usia dini maka, manajemen Pembiayaan Pendidikan yang dikelola oleh Manajemen sekolah sangat diperlukan. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Bara

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Untuk memperoleh informasi dan data-data penulis menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Dalam hal menganalisa data penulis menggunakan tehnik analisis reduksi data, Kemudian menggunakan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan selama dua tahun yaitu bulan juni hingga bulan juli. Dalam dua tahun tersebut TK Islam Mutiara Bunda akan melakukan rapat selama satu kali diakhir semester yang dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara dan guru untuk menyusun anggaran atau perencanaan yang nantinya akan disahkan oleh ketua yayasan kemudian nantinya akan diajukan oleh pihak pemerintah pusat. Proses pelaksanaan di TK islam Mutiara bUnda berupa dana yang diperoleh dari pemerintah pusat berupa BOP yang dikeluarkan selama satu tahun setia enam bulan sekali yaitu Rp10.500.000 untuk dana pendidikan merata serta dana yang didapatkan dari siswa yaitu berupa SPP setiap bulannya Rp35.000 per kepala yang dialokasikan untuk kebutuhan sekolah serta gaji guru. Untuk proses evaluasi dan pertanggungjawaban TK Islam Mutiara Bunda dilakukan langsung oleh kepala sekolah itu sendiri. Proses evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan di TK islam Mutiara Bunda ini memuat bukti pemasukkan serta pengeluaran secara terperinci yang berupa kwitansi untuk dilaporkan ke pikhak yayasan.

Kata kunci : manajemen, pembiayaan pendidikan, manajemen pendidikan anak usia dini



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Islam Mutiara Bunda Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
Nama : Awalia Ayu Sukmawati
NPM : 1711070059
Prodi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Romlah, M.Pd.I
NIP. 196306121993032002

Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd
NIP. 19720818200604100

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd
NIP. 196208231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI TK ISLAM MUTIARA BUNDA SIDOREJO PEKON MUTAR ALAM KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT** Disusun oleh **Awalia Ayu Sukmawati**, NPM: **1711070059**, Jurusan: Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Telah diseminarkan pada hari/tanggal: Jum'at, 02 Desember 2022, pukul 08.00-09.30 WIB, di ruang sidang PIAUD.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Yuberti, M.Pd (.....)

Sekretaris : Kanada Komariyah, M.Pd (.....)

PengujiUtama : Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd (.....)

PengujiPendamping I : Dr.Hj. Romlah, M.Pd.I (.....)

PengujiPendamping II : Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan**



MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

(Q.S. Ali imron : 103)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014).

PERSEMBAHAN

Teriring rasa tulus dan syukur kepada Allah swt. Aku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti dan cintaku kepada orang yang selalu memberi makna dalam hidupku, terutama untuk :

1. Kedua orang tua, bapak Sukarno.A dan Ibu Nurhayati yang telah membimbing, merawatku dan membesarkanku serta mendukung dan memotivasiku untuk mencapai cita-cita. Tiada kata-kata yang dapat terucap dari lisanku atas segala pengorbaan dan jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Saudara saudari ku terimakasih telah memberikan motivasi terbesar dalam berjalannya selama kuliah yaitu adik, kakak, bibi, paman yang telah menyemangatiku selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar pejuang hijrah yang selalu membingku, memotivasiku, hingga menyemangatiku selama kuliah terutama mba yuli murobbi ku, mba aswaliya.
4. Sahabat-sahabatku teman seperjuangan kelas B Pendidikan Islam Anak Usia Dini fakultas tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terutama Annisa, Annita, Delima, devi, Desti, Nova, Fatimah.
5. Seorang tercinta dalam hidupku Atma Dewa dan Anakku M.Reno Lftih yang telah mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Keluarga besar TK Islam Mutiara Bunda yang telah membantu saya dalam terlaksanya dan terselesaikannya selama penelitian.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

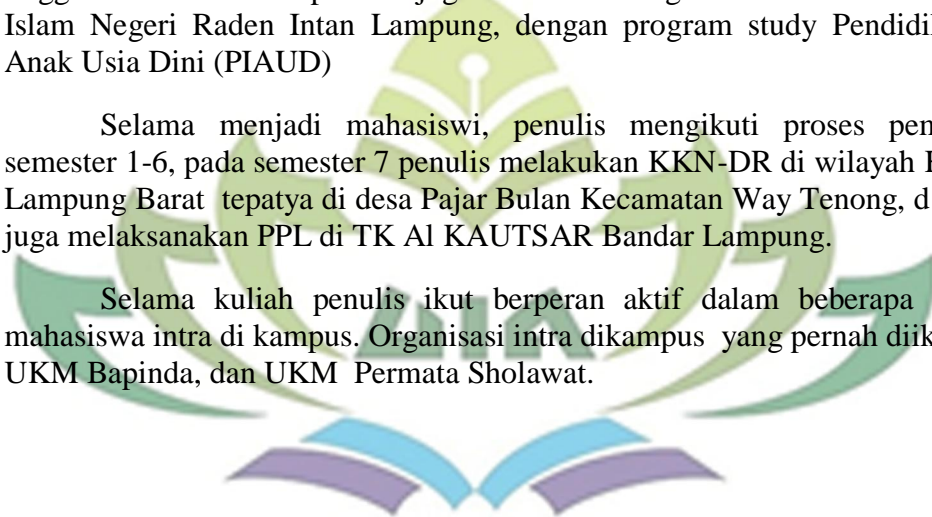
RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Awalia Ayu Sukmawati penulis dilahirkan di Mutar Alam pada tanggal 24 November 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 2 saudara yang merupakan anak dari bapak Sukarno.A dan Ibu Nurhayati.

Penulis telah menempuh jenjang pendidikan formal di MI Darussalam Sidorejo Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat lulus pada Tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan di MTs Al Ikhlas Fajar Bulan Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat lulus pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 way tenong Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di tahun 2017 penulis juga terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan program study Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti proses pembelajaran semester 1-6, pada semester 7 penulis melakukan KKN-DR di wilayah Kabupaten Lampung Barat tepatnya di desa Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong, dan penulis juga melaksanakan PPL di TK Al KAUTSAR Bandar Lampung.

Selama kuliah penulis ikut berperan aktif dalam beberapa organisasi mahasiswa intra di kampus. Organisasi intra di kampus yang pernah diikuti adalah UKM Bapinda, dan UKM Permata Sholawat.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbi 'alamiin, segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam atas limpahan rahmat, ridho serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat ”

Sebagai syarat akhir untuk mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sholawat serta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada baginda rahmatan lil 'alamin Nabi Muhammad saw beserta para keluarga, sahabat Dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. H. Agus Jatmiko, M.Pd selaku Ketua Jurusan PIAUD dan Yulan Puspita Rini, M.Pd selaku sekretaris Jurusan PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Romlah, M.Pd selaku dosen pembimbing 1 yang telah mengarahkan, serta Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Khususnya Prodi PIAUD Yang Telah Mendidik Dan Memberikan Ilmu Pengetahuan Selama Menuntut Ilmu Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Di UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Siti Komariyah, S.Pd selaku Kepala sekolah dan Guru di TK Islam Mutiara Bunda Lampung Barat atas kerjasama dan izinnya penulis melaksanakan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat di pergunakan sebagaimana semestinya bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 11 November 2022

Penulis

Awalia Ayu Sukmawati
NPM.1711070059

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK

SURAT PERNYAYAAN

LEMBAR PERETUJUAN

MOTTO

PERSEMBAHAN.....

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

B. Alasan Memilih Judul

C. Latar Belakang Masalah.....

D. Fokus Masalah

E. Sub Fokus Masalah

F. Rumusan Masalah

G. Tujuan

H. Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

2. fungsi Manajemen Pembiayaan pendidikan Anak Usia Dini

3. Tujuan Manajemn Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini.....

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini .

5. Macam-Macam Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini.....

B. Komponen Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

1. perencanaan pembiayaan pendidikan.....

2. pelaksanaan pembiayaan pendidikan

3. evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan

C. PENELITIAN RELAVAN

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

B. Lokasi penelitian

C. Subjek dan objek penelitian

D. Teknik pengumpulan data

a. Observasi.....

b. Wawancara.....

c. Dokumentasi

- d. Teknik analisis data.....
- e. Uji keabsahan data

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

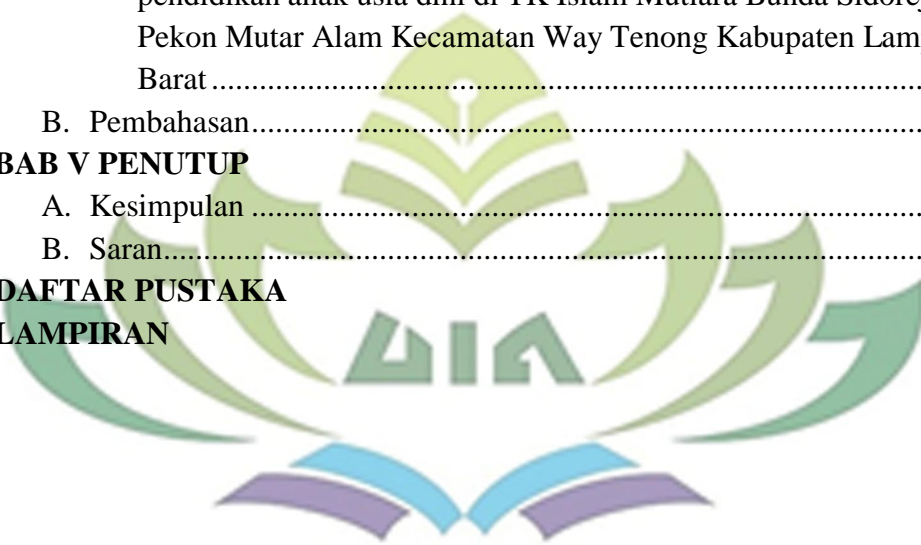
- A. Hasil Penelitian
- a. Perencanaan manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....
- b. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....
- c. Evaluasi dan pertanggungjawaban manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
- B. Pembahasan.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menegaskan terlebih dahulu makna dan istilah katayang digunakan dalam judul penelitian ini,yaitu **”Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Way Tenong Lampung Barat’**. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut :

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.Yang dimaksud dengan implementasi dalam hal ini adalah sampai dimana penerapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu pendidikan.Didalam *oxford learner’s ditionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak.²

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian , pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujun organisasi yang telah ditetapkan.³ Menurut Melayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Manajemen diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya dapat dirumuskan dalam suatu organisasi, dalam mencapai tujuan

² Oxfort Advence Learning Dictionary Of Curnel English As Hjomby (Oxford University, Press, 995) H.959

³ Amirul Mukminin/Pg-Paud/Fip/Unnes’2011 Halm 8

⁴ Saefullah, Manajemenpendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2012)Hal.1

yaitu memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Didalam lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut PAUD) pun dibutuhkan manajemen atau manajemen yang efektif dan efisien. Tujuannya agar ketika pengelolaan lembaga PAUD dapat berlangsung dengan baik maka sumber daya manusia didalam kelembagaan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini.

Pembiayaan pendidikan adalah pembiayaan sekolah yang mana penghasilan serta sumber daya dapat di pergunakan dalam merumuskan dan mengoprasionalkan pendidikan di wilayah yang cukup strategis dan geografis guna untuk tingkat lembaga pendidikan yang bermutu, tentunya berbeda dari yang lain. Pembiayaan pendidikan merupakan pembiayaan dalam rangka kegiatan pendanaan dalam unsur kegiatan yang dilakukan mulai dari pengadaan hingga biaya operasional.⁵

Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan yang layak, yaitu meluncurkan suatu program bantuan pemerintah yakni biaya sekolah yang berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.

Berdasarkan aturan Pemerintah Tahun 2016 Tentang Aturan Patunjuk Tekhnis BOP yaitu menyatakan bahwa dalam menerima bantuan tersebut dalam menerima bantuan, pengusul/paud harus memenuhi persyaratan dalam menerima BOP seperti kelengkapan berkas, jumlah siswa, lama berdirinya lembaga atau program paud/tk.

Manajemen pembiayaan tidak luput dari masalah keuangan. Manajemen yang baik dalam lembaga pendidikan menajdi salah satu syarat mutlak dalam meningkatkn mutu pendidikan tersebut. Salah satu yang menjadikan suatu lembaga yang berjalan dengan baik adalah keuangan. Manajemen keuangan dipaparkan oleh segi dan wardha

⁵ La Hewi, Jurnal Smart Paud, Komersialisasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dikota Kendari, Vol.3, No.1, Januari 2020 H.2

bahwasanya adalah ketepatan keuangan adalah keseriusan dalam mengelola lembaga yang sangat penting pada kelangsungan lembaga.⁶

Penulis menyatakan bahwa Manajemen anak usia dini adalah mengelola, mengkoordinasikan, atau mengarahkan proses interaksi pendidikan antara siswa, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang diberikan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁷

Setiap lembaga pendidikan selalu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan lembaga pendidikan, kebutuhan dana tersebut antar lembaga pendidikan berbeda-beda, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, lembaga pendidikan harus mampu mencari sumber dana dengan berbagai cara. Terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi yang berkaitan dengan manajemen keuangan di lembaga PAUD, diantaranya:

1. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana, dengan demikian dua kegiatan dalam manajemen keuangan di lembaga PAUD, yang pertama mencari sebanyak mungkin sumber keuangan tersebut, kemudian yang kedua, menggunakan semua dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di PAUD

⁶ Egi Evrian Firmansyah And Wardana, "Penguatan Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Didesa Garawangi Dan Desa Rancaputat Kabupaten Majalengka", Jurnal Penelitian 10 Nomor 2 (2016) Hal.235

⁷ Nilawati Tadjuddin, Desain Pembeajaran Anak Usia Dini, Teori Dan Praktik Pembelajarananak Usia Dini, (Aura Publishing : Januari 2015)

2. Penggunaan dana tersebut haruslah efektif serta efisien, selain itu, pada penggunaan semua dana haruslah tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkaitan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (39) mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sementara itu, pada proses pengesahan anggaran sekolah selama ini bisa dibilang cukup rumit, proses pengesahan tersebut dilakukan setelah RAPBS dibuat, kemudian diajukan kepada Kakanwil Depdikbud Provinsi, Depdikbud Kota/Kabupaten (yang mana sekarang menjadi Kepala Dinas Provinsi dan Kota/Kabupaten) untuk mendapatkan persetujuan atau saran serta mendapatkan perbaikan, sekalipun pada akhirnya besaran alokasi dana yang diberikan telah diputuskan pemerintah dan tidak dapat diganggu atau diubah kembali.

Fase perkembangan pendidikan semakin menjadi tolok ukur berkembangnya negara Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Pemerintah selalu berupaya untuk mensejahterakan warga negaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengimplementasikan paradigma pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”,

Kajian manajemen keuangan bukanlah semata-mata mengelola uang yang ada di lembaga pendidikan, uang itu, tidak datang atau ada tanpa digali dan dicari sumbernya yakni Negara dan masyarakat, kemudian makna anggaran pendidikan di sini jelas pemerintah

menyediakan uang untuk membiayai pendidikan, dengan demikian kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan memastikan kehadiran Negara ada dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, turunannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dulu sampai sekarang menggunakan istilah anggaran pendidikan (education budget).

Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini menurut standar tingkat pencapaian anak meliputi perencanaan anggaran (rapbs), pelaksanaan (penggunaan anggaran rapbs), evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran (apbs).

B. Alasan Memilih Judul

Penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini dengan beberapa alasan Penulis tertarik untuk mengetahui penerapan pembiayaan pendidikan sebagai upaya keberhasilan pendidikan, Penerapan pembiayaan dimasing-masing lembaga pendidikan memiliki ciri khas tertentu untuk itu penulis ingin tahu seperti apa penerapan pembiayaan Di TK Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Lampung Barat, Masalah yang diteliti relevan dengan pendidikan yang dipelajari di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses belajar yang memiliki tujuan. Proses belajar ini memiliki tujuan dan pasti memiliki standar atau yardstick sejauh mana pergerakan kita didalam mencapai tujuan tersebut.⁸ Hal ini sangatlah berbeda dengan berbagai tujuan yang lain seperti fisik, jarak, target, serta tujuan dalam pendidikan. Dalam lembaga pendidikan ini hanya bersifat provisional merupakan bersifat sementara dan pendidikan sangat perlu direvisi dengan sesuainya tuntutan perubahan.

Pendidikan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab ii Pasal 3 yang berbunyi :

“Pendidikan Nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.⁹

Dunia pendidikan saat ini haruslah dikelola dengan baik dan secara profesional, dikarenakan ketatnya persaingan. Untuk melaksanakan segala sesuatu agar menjadi tertib, teratur dan terarah maka diperlukannya manajemen. Manajemen merupakan seni untuk mencapai segala sesuatu berdasarkan mencapai suatu organisasi dengan cara mengatur orang lain.¹⁰

Manajemen berasal dari kata *manus* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung berdasarkan *manager* yang berarti

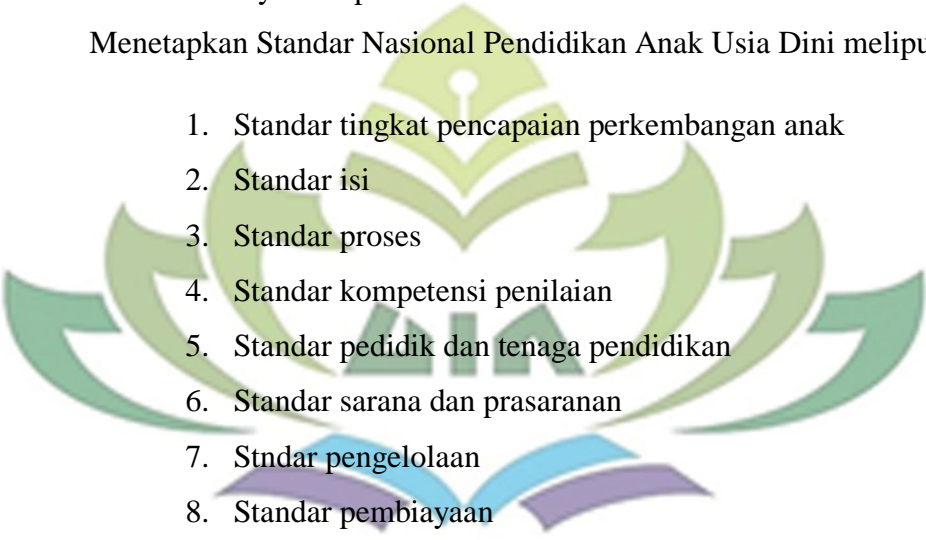
⁸ Tillar, Standarisasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006) Hal. 75

⁹ Undang-Undang Sisdiknas Ri Nomor 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hal.7

¹⁰ Nanag Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000). Hal.3

menangani. *Manager* yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk *to manage* dengan kata benda *management*, dan *management* merupakan orang yang melakukan. Jadi, *managemen* diterjemahkan kedalam bahasa nasional yaitu Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan.¹¹

Dalam upaya untuk dapat menciptakan pendidikan yang memadai baik disekolah formal maupun nonformal pemerintah memiliki peraturan mengenai pendidikan salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 37 Menetapkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :

- 
1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak
 2. Standar isi
 3. Standar proses
 4. Standar kompetensi penilaian
 5. Standar pendidik dan tenaga pendidikan
 6. Standar sarana dan prasarana
 7. Standar pengelolaan
 8. Standar pembiayaan

Dalam hal ini penulis memfokuskan hanya pada salah satu komponen yakni pembiayaan. Keuangan atau pembiayaan adalah sumber penunjang pendidikan secara langsung efektif dan efisien dalam mengelola pendidikan. Pengelolaan biaya adalah pendanaan yang didapatkan melalui segala unsur dan didapatkan mulai biaya operasional maupun biaya personal yang sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan.

Standar pembiayaan merupakan salah satu standar pembiayaan penyelenggaraan PAUD dalam peraturan menteri pendidikan nasional anak

¹¹ Kompri, Manajemen Pendidikan 1, (Bandung: Alfabeta, 2015), H.2

usia dini. Biaya oprasional digunakan dalam gaji guru pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat sedangkan biaya personal merupakan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.¹²

Tabel 1.1 Indikator Standar Pembiayaan

No	Indikator Standar Pembiayaan
1.	Perencanaan pembiayaan pendidikan anak usia dini
2.	Pelaksanaan pembiayaan pendidikan anak usia dini
3.	Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan anak usia dini

Sumber : dinas pendidikan dan kebudayaan tentang standar pembiayaan

Komponen pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional dipakai untuk honor pendidik dan tenaga kependidikan serta sumbangan yang melekat, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Salah satu biaya operasional yaitu untuk membayar gaji guru dengan tenaga pendidik 4 orang berkisar Rp. 175.000 per orang.

Biaya personal sanggup berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Kemudian, Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan forum PAUD diubahsuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, biaya personal pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hal.23

Menurut Nanang Fattah bahwa manajemen pembiayaan pada lembaga satuan pendidikan anak usia dini merupakan biaya yang mempengaruhi dalam kualitas pendidikan di sekolah dan proses belajar mengajar. Manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini merupakan biaya yang dikelola dan dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan program kegiatan pendidikan serta implementasinya dapat disesuaikan dengan adanya perencanaan, dan pelaksanaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³

Penulis mengungkapkan bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini harus ditunjukkan untuk pendidikan yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Suatu sistem biaya pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia dan digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Manajemen pembiayaan ini perlu dilakukan untuk program sekolah pengadaan sarana, prasarana, gaji guru, gaji pegawai, serta keperluan-keperluan lainnya untuk tercapainya visi dan misi sekolah.¹⁴

Penentuan besarnya suatu biaya pendidikan khususnya dalam pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan suatu pendidikan. Hal tersebut meliputi Perencanaan Anggaran (RAPBS), Pelaksanaan (Penggunaan Rapbs), Pengawasan Dan Pertanggungjawaban.¹⁵

Menurut para ahli manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk

¹³ Nanang Fattah, *Pembiayaan Pendidikan, Landasan Teori Dan Studi Empiris*, Jurnal Pendidikan Dasar Nomor 9, April 2008 Hal.4

¹⁴ Dadang Suhardan, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*(Bandung: Alfabeta,2013)H.70

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

membiyai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.¹⁶ Manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini menurut standar tingkat pencapaian anak meliputi perencanaan anggaran (rapbs), pelaksanaan (penggunaan anggaran rapbs), evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran (apbs).¹⁷

Keberhasilan pendidikan sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola serta tanggungjawab atas suatu pembiayaan atau administrasi sekolah yang mencakup masalah keuangan. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas administrasi dapat dilakukan dengan meningkatkan melalui aplikasi, konsep serta manajemen yang digunakan di sekolah.

Berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan bergantung kepada orang yang memimpin, serta melaksanakan tugas-tugasnya dalam kegiatan yang dilakukan. Setiap pemimpin seyogyanya menitikberatkan perhatian dan usaha-usaha agar dalam mengelola pembiayaan tersebut dapat berdaya guna yang diharapkan, dalam arti apapun dan dapat melaksanakan tugas sebagaimana dapat teratur, dan tertib sesuai dengan prosedur kerja yang ditentukan.

Dalam Al Qur'an Allah Swt. Berfirman dalam Surat An Nisa Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

¹⁶ Prof. Dr. Akhdon M.Pd, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya 2015) Halm 23

¹⁷ Sttpa Tahun 2003

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.(qs. An nisa :29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebuah amanat yang harus dilaksanakan dan dipegang oleh siapapun dan disampaikan kepada penerimanya yaitu orang yang ahli dalam hal itu, jangan sekali-kali sampai menggubakan sistem riba dalam sebuah menjalankan pendidikan, khususnya dalam memegang keuangan. Hal ini tercantum pula pada alqur'an surat al luqman ayat 43 yaitu :

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

Untuk melihat suatu keberhasilan pendidikan yang berkualitas, maka dapat dilihat dari sistem manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan yang ada disekolah tersebut. TK Islam Mutiara Bunda merupakan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. TK Islam Mutira Bunda Terletak Di Jl. Air Hitam, Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang sudah berjalan selama 12 tahun yang dipimpin oleh bunda Siti Komariah, S.Pd. Beliau menuturkan bahwa sekolah mendapatkan bantuan pembiyaan seperti bantuan operasional pemerintah (bop) yang digunakan untuk kepentingan sekolah, dan yang perlu direhap dalam sekolah.

Dalam Pendidikan di prasekolah dapat membantu perkembangan anak. Menurut Hurlock, menjelaskan bahwa terdapat sepuluh aspwk perkembangan yang mendorong pertumbuhan dalam lembaga pendidikan khususnya dalam pendidikan pra sekolah. Diantara aspek tersebut adalah sehat badan (fisik), komunikasi, trampil, sosial emosional, dan lainnya.

Bantuan Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) merupakan bantuan program pemerintah yang disediakan untuk membantu adanya dana seperti biaya operasional bagi satuan lembaga pendidikan anak usia dini yang diberikan oleh Pemerintah kepada anak melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga yang dapat mendukung secara langsung kegiatan operasional pembelajaran. Biaya Operasional merupakan biaya yang dipergunakan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Besaran dana Bantuan Operasional Pemerintah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan TK dengan satuan biaya per siswa berkisar Rp 600.000/tahun. Maka dari itu, besarnya dana yang diperoleh dari Bantuan Operasional Pemerintah dan diterima dalam setiap sekolah sangat berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala bagi sekolah-sekolah swasta dengan jumlah siswa yang minim, hingga mereka harus memaksimalkan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program kegiatan sekolah.

Dalam suatu lembaga pendidikan yang berkualitas dibutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Karena pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya. Maka untuk mencapai pendidikan yang berkualitas perlu adanya berbagai perbaikan, baik perbaikan pada sumber daya manusia, yakni kepala sekolah, guru dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.

Menurut Malayu S.P Hasibuan, menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹⁸. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan, Perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi dan pertanggung jawaban.

¹⁸¹⁸ Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: bumi aksara. 2016. Halaman 2

Menurut Soetjipto, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan meliputi, kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggung jawaban yang digunakan untuk penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk menunjukkan taat dalam kegiatan administrasi keuangan sehingga dalam kepengurusannya dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Argyropoulou & Eleftheria, menjelaskan bahwa dengan tidak adanya perencanaan maka dapat membuat kesalahan berupa dana yang dialokasikan serta kurangnya komunikasi. Jadi, perencanaan harus memiliki peran yang penting dalam mengelola dan mengatur keuangan disekolah, sehingga dengan adanya peran tersebut maka minimnya perencanaan akan berpengaruh pada keberhasilan yang diperoleh pada lembaga tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa penulis tertatik dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini”** yang dilakukan di sekolah TK Islam Mutiara Bunda, Sidorejo Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dilihat kegiatan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban

Tabel 1.2
Data Pra Penelitian Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini TK Islam Mutiara Bunda, Sidorejo Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

No	Kegiatan/komponen	Terlaksana	Belum terlaksana
1.	Perencanaan pembiayaan TK	Sudah terlaksana	

2.	Pelaksanaan pembiayaan TK		Belum terlaksana dengan baik
3.	Evaluasi dan pertanggung jawaban pembiayaan TK		Belum terlaksana sepenuhnya

Sumber : data pra-penelitian TK Islam Mutiara Bunda

Berdasarkan tabel diatas maka dapat penulis uraikan bahwa Perencanaana pembiayaan sekolah merupakan anggaran belanja yang dilakukan di TK Islam Mutiara Bunda untuk merencanakan kebutuhan-kebutuha kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam jangka satu tahun kedepan.

Dalam perencanaan ini terdapat rancangan penerimaan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah dalam bentuk rancangan anggaran pembiayaan biaya sekolah (rapbs). Perencanaan disini meliputi dana pembngunan fasilitas tahap, dana peningkata mutu pendidikan, dana kegiata siswa, pendftaran siswa, dan lain-lain.Oleh karena itu, perencanaan pembiayaan di TK Islam Mutiara Bunda Sudah terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pembiayaan sekolah merupakan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di TK Islam Mutiara Bunda dalam prosesnya melakukan berbagai perundingan hasil rapbs. Dalam pelaksanaannya pimpinan unit mengatur bagaimana penerimaan keuangan dapat digunakan sebagaimana semestinya. Serta mengatur bagaimana pengeluaran dan penerimaan untuk dialokasikan kepada masing-masing bidang pendidikan sesuai dengan pembukuan pengeluaran dan penerimaan yang bertanggungjawab adalah bendahara dan dilaporkan oelh pimpinan yayasan serta pengawas keuangan. Dalam pelaksanaan anggaran sekolah ini terdapat 2 hal yaitu Penerimaan (meliputi dana pendaftaran, spp, dana

pembangunan fasilitas, dll) sedangkan Pengeluaran (meliputi pengeluaran rutin yaitu setiap bulan dikeluarkan seperti listrik dll dan pengeluaran non rutin yaitu pengeluaran yang setiap bulannya tidak dikeluarkan)

Berdasarkan uraian tersebut maka pelaksanaan pembiayaan di TK Islam Mutiara Bunda sudah terlaksana dengan baik.

Evaluasi dan pertanggungjawaban merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang berbasis sekolah. Dalam kegiatan evaluasi ini tidak melalui kepala sekolah karena proses keuangan masih berpusat pada yayasan, kepala sekolah hanya bertugas mengkoordinir kegiatan yang ada di TK Islam Mutiara Bunda.

Dalam kegiatan belajar dan bermain seperti bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik, penyediaan alat permainan edukatif luar dan dalam, penyediaan alat mengajar untuk pendidik. Kegiatan pendukung seperti penyediaan makanan tambahan, pembelian alat ATK dan pembelian obat-obatan ringan, kegiatan pertemuan orang tua wali murid, menambah transport pendidik pertemuan gugus depan 4 orang dalam 2 kali pertemuan, penyediaan buku-buku administrasi. Kegiatan lainnya seperti perawatan sarana dan prasarana, dukungan penyediaan alat publikasi, dan layanan listrik.

Dalam kegiatan pembiayaan yang terjadi saat ini banyak permasalahan yang timbul dalam suatu perencanaannya. Masalah tersebut seperti keadaan keuangan yang kurang atau terhambat dalam pembayaran seperti spp dan lainnya. Begitu juga dengan BOP yang seharusnya dua kali dalam satu tahun keluar atau dicairkan ini menjadi momok sekolah bahwasanya BOP hanya keluar satu kali dalam 1 tahun saat kondisi pandemi.

Dari uraian diatas maka dapat di ungkapkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan di Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Wat Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah baik akan

tetapi dalam perincian atau anggaran biaya masih kurang optimal serta pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggaran pembiayaan masih kurang optimal atau belum terlaksana dengan baik.

Seharusnya implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di TK Islam Mutiara Bunda yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa “ orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dalam memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya”. Pasal 8 menyatakan “ masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Akan tetapi pada kenyataannya implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di TK Islam Mutiara Bunda hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah dalam berperan serta dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya. Maka dari itu peneliti merumuskan judul **Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.**

D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, dengan sub fokus penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan anak Usia Dini
3. Evaluasi Dan Pertanggungjawaban Pendidikan Anak Uia Dini

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah “Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan

anak usia dini di tk islam mutiara bunda sidorejo pekon mutar alam kecamatan way tenong kabupaten lampung barat ?

F. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenog Lampung Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sumber dana yang dimiliki TK Islam Mutiara Bunda Lampung Barat, sistem pengelolaan, manajemen keuangan, kendala, laporan keuangan, dan penggunaan keuangan sekolah.

G. Manfaat penelitian

1. Bagi sekolah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pentingnya memajemen pembiayaan atau keuangan (administrasi) untuk menghasilkan suatu program yang lebih baik dan stersusun secara sistematika di Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

2. Bagi orang tua

Dari hasil penelitian ini maka dapat mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Islam Mutiara Bunda agar adanya sikap keterbukaan antara pihak sekolah dan wali murid

3. Bagi pembaca

Dalam penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi dan masukkan dalam perumusan dan konsep tentang Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini serta dapat memberikan informasi mengenai sistem administrasi lembaga pendidikan anak usia dini yang lebih efektif dan efesien di sekolah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut teori George R. Terry, manajemen adalah “suatu proses kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok atau orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata” manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya *managing* (pengelolaan) sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.¹⁹ George Terry menggambarkan saling hubungan langkah-langkah yang olehnya disebutkan 4 fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengontrolan (*controlling*).

Menurut Hersey dan Kenneth h. Blanchard, memberikan batasan manajemen *as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals* (sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi).²⁰

Pengertian manajemen itu sendiri adalah upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh seorang pengelola organisasi dalam mengarahkan kinerja anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi dengan saling bekerjasama dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²¹

Menurut Malayu & Hasibuan, menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan

¹⁹ George R. Terry, Leslie W. Rue, Principles Of Manajemen, Alih Bahasa G.A Ticoalu (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Hlm. 1

²⁰ B. Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), Hal. 1-2.

²¹ Novan Ardy, "Manajemen PAUD Bermutu" (Yogyakarta: Gava Media, 2015), Hlm.121

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Menurut Soetjipto, Menjelaskan pengelolaan keuangan meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertip administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Argyropoulou & Eleftheria, menjelaskan bahwa kurangnya perencanaan dapat membuat penyalahgunaan dana yang dialokasikan serta kurangnya pengorganisasian/pembagian beban dalam bekerja. Jadi perencanaan memiliki peran penting dalam manajemen keuangan sekolah, sehingga minimnya perencanaan akan berpengaruh pada keberhasilan yang diperoleh.

Dalam suatu lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penunjang yang penting, yang sifatnya melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam kondisi yang sangat terpaksa, pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya biaya. Akan tetapi, setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan.

Penanggung jawab administrasi biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertip administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat

yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban

Manajemen Pembiayaan (keuangan) merupakan salah satu gugusan substansi pendidikan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang garapan pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan dalam lembaga pendidik.

Menurut pakar administrasi pendidikan manajemen pembiayaan (keuangan) dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemrolehan dan pendayagunaan secara tertib, efektif, efisien, dan dipertanggungjawabkan dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Manajemen pembiayaan (keuangan) itu merupakan keseluruhan proses upaya mempergunakan dan mendayagunakan semua dana.
2. Penggunaan semua dana taman kanak-kanak harus efektif dan efisien, penggunaan semua dana taman kanak-kanak harus tertip dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait.

Menurut Husnan dan Enny, manajemen pembiayaan (keuangan) menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan keuangan tidak

terbatas dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan seperti direktur keuangan, manajer keuangan dan lain-lain.²²

Berdasarkan sudut pandang islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *At-Tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam *Al-qur'an* seperti pada firman Allah SWT :

QS.As-Sajadah 7

اللَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾

Artinya : Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Maka dapat diketahui bahwa dalam ayat diatas Allah SWT adalah pengatur alam (*AlMudabbir/mengatur*). Keteraturan alam ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam semesta ini. Akan tetapi, karena manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi ini maka sepenuhnya manusialah yang mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam semesta ini.²³

Arikunto dan Yuliana mengemukakan pendapat bahwa manajemen pembiayaan (keuangan) secara umum merupakan kegiatan yang meliputi tiga hal yakni *budgeting* (penyusunan anggaran pembiayaan), *accounting* (pembukuan), dan *auditing* (pemeriksaan). Sedangkan menurut Wijaya, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi

²² 6 S. Husnan Dan Enny Pudjiastuti, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Hal. 4.

²³ Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Islam, *Jurnal At-Ta'dibb*, Vol.8 No.2,2013, Hal.15

keuangan. Hal itu merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.²⁴

Maisyaroh berpendapat bahwa, manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.²⁵

Menurut Weston dan Brigham, manajemen pembiayaan (keuangan) ialah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekayaan organisasi, khususnya organisasi perusahaan atau organisasi bisnis.²⁶

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa Manajemen Pembiayaan pendidikan merupakan pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha untuk memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun orang tua siswa secara transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.

Istilah keuangan maupun pembiayaan sama sekali tidak ada pertentangan dalam penggunaannya. Hal ini jelas terlihat dari teori-teori yang penulis baca keduanya sama saja. Dari pendapat di atas dapat kita sarikan bahwa manajemen pembiayaan atau disebut manajemen keuangan merupakan suatu usaha dalam mencari sumber dana, membelanjakan dana tersebut sampai pada tahap mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilakukan selama menggunakan dana tersebut.

²⁴ A. Hermino, *Assesment Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hal. 181-183

²⁵ Daryanto Dan M. Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jogjakarta: Gave Media, 2013), Hal. 129

²⁶ Dewi Utari, Dkk., *Manajemen Keuangan: Edisi Revisi Kajian Praktik Dan Teori Dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), Hal. 1.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, ada baiknya jika penulis mengemukakan hubungan antara kualitas sebuah pendidikan dengan manajemen pembiayaan (keuangan). Pembiayaan merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai tingkat kualitas pendidikan yang diinginkan. Sebetulnya, banyak faktor penentu terhadap keberhasilan kualitas pendidikan. Jadi, biaya bukan satu-satunya faktor penentu. Akan tetapi, biaya menjadi penyempurna untuk mendorong tercapainya kualitas pendidikan.²⁷

Hal ini sependapat dengan Rohiat bahwa pendidikan membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, keuangan atau pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah menjadi faktor esensial. Kebutuhan untuk pembelajaran yang baik tentunya memerlukan pembiayaan yang memadai.²⁸

Dalam lingkup pendidikan, menurut Jamal manajemen keuangan sudah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.²⁹

Pembiayaan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa manajemen pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya angan-angan.³⁰

Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono, pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan

²⁷ Rohiat, Manajemen Sekolah, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2012), Hal. 27.

²⁸ Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 192

²⁹ Jamal M. Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), Hal. 217.

³⁰ 4 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), Hal.5

dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.³¹

Nanang Fattah mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (atk), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.³²

2. Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Fungsi dari manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian atau pengawasan. Berikut penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.³³

Definisi secara umum yang dikemukakan oleh Sondang, bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa perencanaan merupakan bagian utama setelah kita menentukan sebuah tujuan yang ingin

³¹ Ibid, Hal 87

³² Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hal. 112

³³ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Hal. 49.

³⁴ Sondang P. Siagaan, *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hal. 36

dicapai. Tanpa adanya perencanaan, tujuan yang sudah kita tetapkan kurang dapat dicapai, artinya dalam membuat sebuah perencanaan perlu adanya langkah-langkah yang jelas.

Salah satu cara yang paling lumrah dikemukakan dalam penyusunan suatu rencana adalah dengan mengatakan bahwa perencanaan berarti mencari dan menemukan jawaban terhadap enam pertanyaan, yaitu: apa, di mana, bilamana, bagaimana, siapa, dan mengapa. Berikut penjelasannya.

a. Pertanyaan "apa"

Pada dasarnya, pertanyaan "apa" menyangkut tiga hal, yaitu apa yang akan dikerjakan, sumber dana dan daya apa yang dibutuhkan, serta sarana prasarana apa yang diperlukan. Disamping itu, sumber dana pun harus diketahui dengan jelas jumlah dan mutunya. Alokasi dana dan daya itu pun perlu terlihat dalam rencana. Agar sebuah perencanaan berjalan dengan baik pun di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, meski terkadang banyak kendala dalam menyediakannya.³⁵

b. Pertanyaan "di mana"

Pertanyaan ini berkaitan dengan pemanfaatan lokasi berbagai kegiatan akan berlangsung. Dalam penentuan lokasi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: efisiensi; aksesibilitas; kemudahan dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana yang diperlukan; tersedianya tenaga kerja. Artinya penentuan lokasi kegiatan tertentu harus dikaitkan dengan pertimbangan, yaitu pertimbangan internal dan eksternal.³⁶

c. Pertanyaan "bilamana"

Seorang manajer dituntut memiliki sense of timing. Artinya kemampuan memilih waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal tertentu. Hal yang paling berharga dalam sebuah organisasi adalah waktu. Sebagai hal yang paling berharga, waktu tidak mungkin

³⁵ Sondang P. Siagaan, Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi, ..., Hal. 38.

³⁶ Ibid, Hal.40

diperbaharui. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan manjerial seseorang sering ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola waktu.³⁷

d. Pertanyaan "bagaimana"

Dalam satu rencana perlu terlihat dengan jelas jawaban terhadap pertanyaan bagaimana cara orang-orang dan berbagai satuan kerja dalam organisasi menyelenggarakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, semua orang dan semua satuan kerja dalam organisasi perlu mengetahui bukan hanya cara dan teknik terbaik untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga memahami dan menaati aturan main yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

e. Pertanyaan "siapa"

Pertanyaan siapa perlu dijawab pada siapa yang akan melaksanakan rencana tersebut, baik yang menyangkut tenaga kerja yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas pokok, maupun yang menyangkut mereka yang bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan penunjang. Artinya menyangkut tenaga manajerial, tenaga fungsional dengan berbagai jenis profesinya, serta tenaga pelaksana kegiatan operasional.

f. Pertanyaan "mengapa"

Menanyakan pertanyaan "mengapa" berarti berusaha menemukan pembenaran yang meyakinkan tentang jawaban-jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan lainnya dalam proses perencanaan. Artinya, pertanyaan "mengapa" ditujukan kepada jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan apa, dimana, bilamana, bagaimana, dan siapa.³⁸

Fungsi pengendalian (pengawasan) merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat lemahnya

³⁷ Ibid, Hal 42

³⁸ Ibid, Hal 46

pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.³⁹ Menurut siagaan, pengawasan ada karena beberapa hal berikut ini.⁴⁰

- a) Adanya orientasi kerja dalam setiap organisasi yaitu efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Dalam praktik, ketiga orientasi kerja tersebut diterapkan sekaligus karena memang berkaitan satu sama lain dan sangat diperlukan dalam menjalankan roda organisasi.
- b) Pengawasan dilakukan all of time di berbagai kegiatan. Hal ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan. Artinya setiap manajer sebagai pelaksana fungsi pengawasan harus mampu mendeteksi berbagai petunjuk kemungkinan timbulnya berbagai hal negatif dalam menjalankan roda organisasi.
- c) Adanya ketidaksempurnaan para pelaksana. Manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna memungkinkan untuk berbuat khilaf, bahkan berbuat kesalahan. Artinya, walaupun terjadi penyimpangan dari rencana atau pemborosan sekalipun, belum tentu bahwa hal-hal negatif itu terjadi karena kesengajaan, sebab sangat mungkin faktor lainlah yang menjadi penyebabnya, seperti kekurangan pengetahuan, atau faktor sejenis itu.
- d) Adanya proses dasar pengawasan yang diketahui dan ditaati bersama. Proses dasar pengawasan yang dimaksud adalah, adanya standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Tujuan pengawasan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) haruslah positif dan konstruktif, yaitu untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material dan tenaga di lembaga pendidikan islam. Disamping itu bertujuan untuk membantu menegakkan agar prosedur, program dan peraturan ditaati, sehingga

³⁹ Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan,...., Hal. 400

⁴⁰ Sondang P. Siagaan, Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hal. 126-128.

dapat mencapai efisiensi lembaga pendidikan islam yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya.

3. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan dari manajemen keuangan atau pembiayaan pada lembaga di lembaga pendidikan adalah untuk sedemikian rupa sehingga semua upaya pemerolehan dana dari berbagai dapat dilakukan sebaik-baiknya. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya maka semua upaya pemerolehan dana dapat berhasil. Sumber dana ini berasal dari pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional Kantor Dinas Pendidikan Nasional) yayasan, atau pihak-pihak lainnya. Selain itu, tujuan pelaksanaan keuangan atau pembiayaan dilembaga pendidikan ini adalah untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau dana yang berasal dari semua sumber. Dengan pengaturan yang secara efektif, efisien, tertip, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Fadlillah tujuan pendidikan anak usia dini secara umum sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya.³⁶ Dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga dimaksudkan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh seorang anak supaya dapat berkembang dengan baik dan maksimal. Menurut kurikulum Tahun 2004, pendidikan pada anak usia dini adalah dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisik-motorik, kemandirian maupun seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Hal ini menggambarkan bahwa semua jenis perkembangan yang anak miliki dapat dikembangkan melalui proses sejak dini Menurut Fadlillah beberapa tujuan pendidikan anak usia dini secara khusus yakni: a). Terciptanya tumbuh kembang anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan

prasekolah; b). Terciptanya peningkatan pengetahuan, dan sikap orang tua dalam upaya membina tumbuh kembang.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam pengembangan program pendidikan anak usia dini di masyarakat dewasa ini partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dipandang sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan secara mantap. Oleh karena itu partisipasi masyarakat selalu diusahakan untuk dikembangkannya sejak awal pelaksanaan program, dan diharapkan bisa berlangsung terus sampai tercapainya tujuan program.

Dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat khususnya program paud, para tokoh masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat lingkungan guna mendukung keberhasilan program.

Sebagian besar pelaksana paud (pendidikan anak usia dini) adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, maupun lsm, dan hanya sebagian yang ditangani oleh pemerintah, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan paud yang ada selama ini. Lemahnya sosialisasi tentang penyelenggaraan paud selama ini berdampak negatif terhadap pelaksanaan program paud. Peran serta masyarakat secara luas memberikan andil yang besar terutama dalam mendukung sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Peran dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat mendasar, namun banyak kita jumpai ketimpangan yang ada dalam pelaksanaan paud. Ada yang sangat berhasil dilihat dari banyak dan lengkapnya fasilitas yang dimiliki di pelaksanaan paud serta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pengelola dan sebagai tutor. Di

lain pihak banyak pula penyelenggaraan paud yang tak mampu melaksanakan program kegiatannya, bahkan sekedar memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan.

Kemampuan implementasi manajemen suatu program merupakan landasan utama bagi kelancaran pelaksanaan program, makna positif atau negatif sebagai hasil implementasi manajemen terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat bagi pelaksanaan suatu program. Inti sari dari manajemen adalah untuk mengakui adanya kenyataan kelangkaan dan lalu memahami bagaimana caranya mengorganisir masyarakat dengan cara yang menghasilkan penggunaan sumber dapat paling efisien. Manajemen dan partisipasi masyarakat memiliki dampak terhadap kualitas penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini, bila manajemen dan partisipasi masyarakat positif, akan memiliki dampak yang positif pula terhadap pelaksanaan program paud, baik dalam bentuk kelompok bermain maupun penitipan anak, sebaliknya jika manajemen pengelolaan pendidikan anak usia dini serta partisipasi masyarakat negatif, berpengaruh pula terhadap lemahnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut sebagai masa emas perkembangan, yang populer dikenal sebagai *golden age*. Anak-anak pada usia dini rentan terhadap segala tekanan dan paksaan serta hal-hal yang dapat memicu stress⁴¹. Penanganan dan pemberian stimulus pada anak yang tidak tepat dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri.

Oleh karena itu penyelenggaraan dan pengelola PAUD hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tahap- tahap perkembangan anak. Sebagian besar pelaksana lembaga paud adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, maupun lsm, dan hanya

⁴¹ (Direktorat Paud, 2006)

sebagian yang ditangani oleh pemerintah, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan paud yang ada selama ini.

Ada beberapa prinsip yang perlu di pegang teguh dalam manajemen di taman kanak-kanak yaitu sebagai berikut :⁴²

- a) Sumber dana pendidikan di taman kana-kanak tidak sedikit, tidak hanya dari perintah atau atau yayasan yang menaunginya. Taman kanak-kanak bisa secara kreatif mencari sumber-sumber dana pendidikan dalam rangka eksistensinya sebagai lembaga pendidikan prasekolah.
- b) Dana pendidikan yang tersedia atau ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Efektif berarti semua dana yang digunakan semata-mata untuk pendidikan taman kanak-kanak sedangkan efisien adalah dana yang tersedia berapapun banyaknya harus didayagunakan sebaik mungkin.
- c) Semua manajemen keuangan ditaman kanak-kanak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Pelaksanaan manajemen keuangan ditaman kanak-kanak merupakan tanggung jawab kepala taman kanak-kanak. Namun pelaksanaannya dapat melibatkan guru-gurunya. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja taman kanak-kanak (rapbt).

Prinsip-prinsip di atas berlaku untuk semua jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini. Hal ini membedakan ialah prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan anak. Namun, secara umum memiliki titik tekan yang sama, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi peserta didik guna untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik ke depannya.

⁴² Dr. Ibrahim Bafadal,M.Pd. Dasar-Dasar Manajemen Dan Supervisi Taman Kanak-Kanak.(PT. Bumi Aksara)Hal 46

5. Macam-Macam Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk membiayai terlaksananya kegiatan belajar mengajar (kbm) yaitu “biaya langsung dan biaya tidak langsung”.biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.Biaya rutin biasanya untuk lain-lain. Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau mendirikan bangunan.Jenis bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk membiayai terlaksananya kegiatan belajar mengajar (kbm) yaitu “biaya langsung dan biaya tidak langsung”.⁴³

Biaya langsung atau biaya operasional adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan.Biaya langsung dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.Biaya rutin biasanya untuk lain-lain.Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau mendirikan bangunan.

Biaya langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan secara langsung dengan hal-hal mendasar yang menjadikan suatu pendidikan dapat terlaksana atau tidak, misalnya biaya untuk menggaji guru, pembimbing, pegawai, pimpinan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan material alat-alat kantor, pembelian tanah, dan termasuk pembangunan gedung;

Sedangkan biaya tidak langsung atau biaya personal, merupakan biaya yang harus dikeluarkan sekolah atau dibayarkan oleh orang tua siswa (secara tidak langsung), oleh karena muncul sebagai implikasi dari penggunaan suatu fasilitas sarana dan prasarana, misalnya pajak listrik, air, kendaraan bermotor, bangunan, dan fasilitas-fasilitas lain yang telah ditetapkan pemerintah.⁴⁴

⁴³Nanang Fattah, *Op, Cit. Hal 65*

⁴⁴ M. Hizbul Mufhin, *Administrasi Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*, (Klaten: CV Gema Nusa, 2015), Hal. 265.

Menurut Peraturan Pemerintah (Pp) RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Snp) Pasal 62 Ayat (1) dinyatakan bahwa “pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya oprasional dan biaya non oprasional”. Untuk lebih jelasnya diperediksikan sebagai berikut:

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- b. Biaya oprasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya oprasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan Pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 46 Ayat (1) “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.⁴⁵ pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang memberikan dana kepada sekolah atau madrasah yang berasal anggaran pendapat dan belanja negara (apbn) yang mekanismenya disalurkan melalui pemerintah tingkat I yaitu provinsi dan dilanjutkan ke pemerintah tingkat ii yaitu kabupaten atau kota. Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa pemerintah pusat wajib mengeluarkan dan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) untuk sektor pendidikan

⁴⁵ Undang-Undang RI , 2006, No. 19 Tahun 2005 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*(SISDIKNAS), Bandung: Citra Umbara. Hal. 209

B. Komponen Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Proses pengelolaan keuangan di paud meliputi: perencanaan pembiayaan, strategi mencari sumber dana paud, penggunaan keuangan paud, pengawasan dan evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban. Selanjutnya, pemasukan dan pengeluaran keuangan paud diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja (rab). Kegiatan di atas di jabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan secara umum diartikan bahwa suatu proses berfikir secara logis dan pengambilan keputusan secara rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.⁴⁶

Menurut Erly Suandy mengartikan perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.⁴⁷ Dalam perspektif islam menjelaskan bahwa terdapat ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan. Berikut ayat al Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 7

⁴⁶ Suharsimi Arikunto Dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditiya Media, 2008) Hlm 9-14

⁴⁷ Udin Syaefudin Sa'ud, Abn Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu Mpendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm 46.

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلِمُوا تَبِيرًا ﴿٧﴾

Artinya :Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S. Al Isra' ayat 7)

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipial yang tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik.

Dalam pendidikan di sekolah perencanaan pembiayaan (keuangan) mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses kegiatan dalam penyusunan anggaran (*budget*). Rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja (rapb) harus berdasarkan pada rencana pengembangan lembaga dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Penyusunan rapb tersebut harus melibatkan pengelola, pendidik dan forum orang tua. Rapb perlu disusun pada setiap tahun ajaran dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

Prinsip penyusunan rapb, antara lain adalah RAPB harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab dan transparan, RAPB harus ditulis dalam bahasa sederhana dan jelas dan dipajang ditempat terbuka di sekolah, Dalam menyusun RAPB, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah

Proses penyusunan RAPB meliputi, Menggunakan tujuan jangka jangka menengah dan jangka pendek yang ditetapkan di dalam rencana

pengembangan sekolah, Menghimpun, merangkum dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama kedalam berbagai bidang yang luas cakupannya, Menyelesaikan analisis kebutuhan, Memprioritaskan kebutuhan, Mengkonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah, Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan, Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan dan sebagainya), dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.

Tabel 1.3 Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah TK Islam Mutiara Bunda tahun ajaran 2020/2021

Rencana pendapatan			Rencana Penggunaan			Realisasi	
No	Sumber Dana	Jumlah anak	Jumlah guru	Per Anak (RP)	Per bulan		Per Tahun
1.	Uang Pendaftaran	20		25.000		500.000	✓
2.	Uang SPP	20		35.000	700.000	8.400.000	✓
3.	Uang Pembangunan	20		75.000		1.500.000	✓
4.	Uang Seragam	20		350.000		7.000.000	✓
5.	Uang buku Paket	20		250.000		5.000.000	✓
6.	Uang raport	20		50.000		1.000.000	✓
7.	Uang komite	20		50.000	1.000.000	12.000.000	✓
8.	Uang foto	20		25.000		500.000	✓
9.	Uang ijazah	20		150.000		3.000.000	✓
10.	Gaji guru		4		700.000	2.100.000	✓
11.	Kegiatan guru dengan orang tua	20				1.000.000	✓
	Jumlah			1.010.000	2.400.000	42.000.000	✓

Dalam penyusunan anggaran (*budgeting*) merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya dalam menyusun anggaran ini terdapat perundingan/kesepakatan antara puncak

pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu kesepakatan ini merupakan pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.⁴⁸

Perkembangan jumlah layanan PAUD tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah dan masyarakat, misalnya peran dan kesadaran orang tua peserta didik agar anaknya menjadi peserta didik di lembaga PAUD. Untuk penyelenggaraan PAUD dibutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya ini dapat bersumber dari pendiri lembaga PAUD, dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dan industri.

Menurut Ghozali dalam Balitbang Depdiknas (2006) bahwa biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Serupa dengan pendapat tersebut, Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Nasional (dalam Balitbang Depdiknas, 2006) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input), baik berupa barang (natura) atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Kedua definisi tersebut samasama menekankan pada penggunaan sumber daya atau pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Badan Pusat Statistik (dalam Balitbang Depdiknas, 2006) menitikberatkan pada jenis-jenis sumber biaya dengan menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat.

Dari dua sumber di atas dapat dimaknai bahwa setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya untuk pemenuhan penyelenggaraannya. Biaya pendidikan tersebut dapat meliputi sumber perolehannya dan jumlah pengeluarannya. Pada biaya pengeluaran meliputi beberapa jenis biaya,

⁴⁸ Muhaimin, "Manajemen Pendidikan" *Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) Cet.2, H.357-372

antara lain pembelian sarana prasarana, pembiayaan honor/insentif pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Fatah dalam Nurteji (2008), pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan, antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay/expenditure*). Selanjutnya dalam Nurteti (2008), dinyatakan bahwa: “keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan Perkembangan jumlah layanan PAUD tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah dan masyarakat, misalnya peran dan kesadaran orang tua peserta didik agar anaknya menjadi peserta didik di lembaga PAUD. Untuk penyelenggaraan PAUD dibutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya ini dapat bersumber dari pendiri lembaga PAUD, dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dan industri.

Menurut Ghozali dalam Balitbang Depdiknas (2006) bahwa biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Serupa dengan pendapat tersebut, Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Nasional (dalam Balitbang Depdiknas, 2006) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input), baik berupa barang (natura) atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Kedua definisi tersebut samasama menekankan pada penggunaan sumber daya atau pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu.

Badan Pusat Statistik (dalam Balitbang Depdiknas, 2006) menitikberatkan pada jenis-jenis sumber biaya dengan menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat. Dari dua sumber di atas dapat dimaknai bahwa setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya untuk pemenuhan penyelenggaraannya. Biaya pendidikan tersebut dapat meliputi sumber perolehannya dan jumlah pengeluarannya. Pada biaya pengeluaran meliputi beberapa jenis biaya, antara lain pembelian sarana prasarana, pembiayaan honor/insentif pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Menurut Fatah dalam Nurteti, pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan, antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay/expenditure*).

Selanjutnya dalam Nurteti, dinyatakan bahwa: “keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan kursuskursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran atau adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula”.

Dari 2 (dua) pendapat tersebut penulis dapat mengungkapkan bahwa dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat

dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Terkait dengan pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada Pasal 47 sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.

Maksud prinsip keadilan adalah bahwa sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggaraan pendidikan. Prinsip kecukupan, maksudnya adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Keberlanjutan maksudnya bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20 per sen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD (UUSPN Nomor 20/2003). Pendanaan yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut guna penyelenggaraan PAUD diusahakan agar dipenuhi sesuai dengan salah satu isi Standar PAUD dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, yaitu perihal standar pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dikemukakan dalam standar tersebut meliputi: 1) biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; 2) biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung; dan 3) biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Menurut amanat Undang-Undang tersebut jelas bahwa dalam rangka meningkatkan layanan PAUD , perihal pendanaan difasilitasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, se jauh ini pendanaan yang diberikan oleh pemerintah melalui dana dekonsentrasi (dana bantuan operasional) pada PAUD baru terbatas pada beberapa lembaga PAUD. Berbagai program dana bantuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti Bantuan Rintisan Program, Bantuan Kelembagaan, Bantuan Kerja Sama, Bantuan Pusat Unggulan Program PAUD , dan Bantuan Rintisan Program Pos PAUD di Daerah Terpencil (Kebijakan dan Program PAUD tahun 2011. Sejalan dengan era otonomi, semua kebutuhan penyelenggaraan PAUD tidak lagi harus dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi pendidikan, penyelenggaraan PAUD di daerah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing (UU No.33/2004). Dengan adanya Undang-Undang tersebut yang salah satunya mengatur kewajiban pemerintah daerah, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan lembaga PAUD

TK Islam Mutiara Bunda merupakan salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan yayasan Pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat memiliki manajemen keuangan dengan diawali menginput data keluar masuk uang secara manual dan menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi semakin canggih untuk penginputan data keluar masuk keuangan di TK Islam Mutiara Bunda menggunakan computer dan print out rincian pembayaran. Berbagai sumber perolehan dana penyelenggaraan PAUD umumnya berasal dari: 1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota); 2) masyarakat seperti dari tokoh masyarakat, instansi terkait, dunia usaha dan industri; dan 3) lembaga PAUD sendiri. Sumber dana penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD secara langsung seperti dana bantuan rintisan PAUD atau dana PAUD Percontohan. Selain

itu, dana dari Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD melalui pemerintah provinsi yang disebut dana dekonstrasi (dekon).

Dana dekonstrasi berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonstrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonstrasi yang diterima lembaga PAUD, antara lain bantuan rintisan PAUD, PAUD Percontohan tingkat kecamatan/desa, dan orientasi teknis pembelajaran PAUD. Selanjutnya, pemerintah provinsi melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberi bantuan dana penyelenggaraan PAUD dengan jumlah relatif kecil, karena keterbatasan kemampuan pemerintah provinsi dalam penganggaran bidang pendidikan.

Umumnya bantuan dana tersebut diterima lembaga PAUD berupa alat permainan edukatif. Bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota melalui APBD relatif masih kurang dan umumnya diberikan kepada lembaga PAUD untuk membayar honor insentif pendidik PAUD dan alat permainan edukatif. Masyarakat ikut berperan sebagai sumber dana bantuan penyelenggaraan PAUD. Tokoh masyarakat memberi bantuan dalam bentuk tenaga, uang, dan barang. Instansi terkait seperti dinas kesehatan melalui Posyandu memberi bantuan pemberian vitamin, pemeriksaan gigi, dan kesehatan anak. Dunia usaha dan industri memberi bantuan dana kepada beberapa lembaga PAUD berupa pemberian alat permainan edukatif.

Adapun sumber dana yang dimiliki oleh TK Islam Mutiara Bunda ialah:

1. Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah telah disediakan melalui anggaran khusus Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), untuk pengeluaran serta laporan pertanggungjawaban dalam operasional serta pemanfaatan dana BOP harus sesuai dengan anggaran serta peraturan yang telah ditentukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah serta dalam meningkatkan mutu

siswa. Selain anggaran BOP, TK Islam Mutiara Bunda mendapat dana bantuan dari pemerintah berupa BOSDA, kedua bantuan tersebut diterima satu tahun sekali. BOP adalah satu dari tiga unsur yang membentuk biaya produksi. Dua unsur lain adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi, menurut *Investopedia*, adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang ditanggung dari pembuatan produk atau penyediaan layanan. Dalam hal ini BOP adalah biaya tidak langsung.

Penjumlahan antara BOP, biaya bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung adalah total biaya produksi. Dengan menghitung biaya produksi, kita akan menemukan apa yang kerap disebut sebagai harga pokok produksi atau HPP. Singkatnya, total biaya produksi adalah HPP itu sendiri.

Agar mencapai titik impas, maka setidaknya harga jual harus sama dengan biaya produksi per unit. Harga jual yang lebih besar dari biaya per unit menghasilkan keuntungan, sementara jika lebih rendah berakibat kerugian. Masalahnya BOP adalah unsur yang lebih sulit dihitung ketimbang dua unsur lain. Hal inilah yang kerap jadi masalah, seperti contoh pabrik tahu yang disinggung di atas. Untuk mengetahui biaya bahan baku, perusahaan tinggal melihat bukti pembelian atau pemesanan; sementara untuk melihat biaya tenaga kerja tinggal cek pengeluaran gaji bulanan. BOP tidak demikian. Ia merupakan bagian tidak terlihat dari sebuah produk.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Penggunaan dana BOP PAUD/TK di Satuan PAUD atau Lembaga harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Pembelajaran (Minimal 50% dari dana BOP):

- a) Buku-buku pembelajaran TK yang dibutuhkan;
 - b) Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
 - c) Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.
- b. Kegiatan Pendukung (Maksimal 35%):
- a) Penyediaan buku administrasi;
 - b) Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - c) Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung;
 - d) . Menambah transport pendidik;
 - e) Penyediaan makanan sehat.
- c. Kegiatan Lainnya (Maksimal 15%):
- a) Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;
 - b) Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD;
 - c) Langganan listrik, telepon/internet, air.

2. Dana dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

Di TK Islam Mutiara Bunda memiliki Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang wajib dibayarkan oleh wali murid, guna menunjang kegiatan belajar mengajar, snack murid, dan lain sebagainya. Untuk pembayaran spp setiap angkatan berbeda-beda. SPP dilakukan setiap bulan dengan membayarkan masing-masing kepala Rp.35.000

3. Dana Komite dan Daftar Ulang

Selain dari kedua sumber dana diatas, di TK Islam Mutiara Bunda memiliki sumber dana yang dihimpun dari komite dan daftar ulang murid

yang dilaksanakan setiap tahun. Pembayaran yang dilakukan untuk komite dan daftar ulang yaitu untuk komite sendiri Rp.50.000 per anak sedangkan untuk biaya daftar ulang Rp250.000 per anak. Untuk administrasi keuangan yang dikelola oleh bendahara TK Islam Mutiara Bunda setiap bulan berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan uang makan, sedangkan uang komite serta administrasi daftar ulang dibayarkan pada saat pergantian tahun ajaran, adapun rincian pembayaran uang daftar ulang terdapat beberapa hal yang harus dibayarkan seperti keperluan umum, kelengkapan administrasi, kesehatan, uang alat, fasilitas belajar, pengolahan lingkungan, renang dan tutup tahun. Kemudian sistem pengelolaan keuangan di TK TK Islam Mutiara Bunda dikelola sendiri kemudian dimasukkan kedalam BMT, selanjutnya untuk pelaporan keuangan sekolah dilaksanakan setiap bulan dan satu tahun.

Adapun kendala yang dialami oleh bendahara sekolah ketika terdapat hal yang mendadak dan harus segera dilaporkan seperti anggaran BOP Penggunaan keuangan tahunan yang ada di TK Islam Mutiara Bunda untuk kegiatan seperti pemenuhan alat atau media, alat perkantoran, ekstrakurikuler, tunjangan guru dan karyawan, sarana prasarana dan lain sebagainya, selanjutnya, terdapat 6 administrasi keuangan yang dimiliki oleh TK Islam Mutiara Bunda , adapun administrasi keuangan di TK Islam Mutiara Bunda , ialah:

Tabel 1.4 Kelengkapan Administrasi Pembiayaan TK Islam Mutiara Bunda

Nama buku	keterangan	
	Ada	Belum Ada
Buku RAPBS	✓	
Buku Kas umum	✓	
Buku kas pemasukkan		✓
Buku kas pengeluaran		✓
Buku laporan keuangan	✓	
Kartu iuran spp	✓	
Buku laporan BOP	✓	
Slip gaji guru	✓	

Sumber : Data Penelitian di TK Islam Mutiara Bunda

Tabel diatas menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi keuangan di TK Islam Mutiara Bunda telah lengkap dan telah tercatat sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, sehingga memudahkan bendahara jika sewaktu-waktu kepala sekolah atau komite meminta laporan keuangan lembaga.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dari pelaksanaan ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky juga mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.⁴⁹

Pada tahap pelaksanaan pembiayaan sekolah diwajibkan untuk menggunakan semua anggaran yang didistribusikan pada dirinya untuk melaksanakan tugas masing-masing.⁵⁰ misalnya pesuruh taman kanak-kanak setelah mendapatkan anggaran kebersihan, ia menggunakan anggaran tersebut untuk merawat kebersihan taman kanak-kanak. dalam hubungannya dengan pelaksanaan anggaran tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap personel sekolah. diantaranya adalah Setiap penggunaan dana yang tersedia itu harus disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun oleh lembaga., Semua pembelian dan pengeluaran uang harus dilengkapi dengan kuitansi pembelian dan kuitansi pengeluaran, Semua penggunaan dana taman kanak-kanak harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam rangka mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban semua penggunaan dana taman

⁴⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 70

⁵⁰ Ibrahim Bafadal, Dasar-Dasar Manajemen Dan Supervisi Taman Kanak-Kanak, (2012) Pt. Bumi Aksara, Hal 51

kanak-kanak harus dibukukan secara saksama dan kontinu melalui proses pembukuan keuangan yang berlaku.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Manajemen pembiayaan di TK Islam Mutiara Bunda idorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat terdiri dari dua kegiatan, yaitu pencatatan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Dalam hal pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran, bendahara TK yang sekaligus menjadi guru melaksanakan sistem akuntansi yang sangat sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja dengan menggunakan 2 buku yaitu buku khusus dana BOP dan buku khusus SPP. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah menerima uang dari BOP dan dari SPP setelah itu dana BOP di gunakan untuk biaya-biaya yang telah di rancang sesuai dengan anggaran belanja sekolah sedangkan SPP diperuntukkan untuk gaji guru.

Menurut Mulyono menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran harus ada pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Pemisahan tugas dan wewenang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan. Pentingnya pemisahan tugas dan wewenang dalam pengelolaan pembiayaan dikemukakan oleh Mestry dalam pembahasan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua dan pendidik terhadap pertanggungjawaban manajemen keuangan sekolah di

beberapa sekolah dasar di Gauteng, Afrika Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan sekolah merupakan tanggungjawab Badan Pengelola sekolah, dalam pelaksanaannya tugas ini didelegasikan kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dan untuk menghindari atau meminimalisasi munculnya penipuan, pencurian dan kolusi.

Hal ini belum sesuai dengan TK Islam Mutira Bunda karena di sekolah ini belum ada terlebih dahulu membuat pertemuan dengan wali murid dan sama-sama menetapkan berapa sanggupnya dalam membayar uang sekolah. Di dalam pertanggungjawaban terdapat fungsi pengawasan. Pengawasan atau pemeriksaan anggaran sebagaimana yang dikemukakan Fattah (2009:67) merupakan aktivitas menilai dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijaksanaan dan standar- standar yang berlaku. Lebih lanjut Fattah menyebutkan bahwa pengawasan/pemeriksaan biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga (*external audit*), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (*internal audit*) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan di TK Islam Mutira Bunda hanya dilaksanakan secara internal saja yaitu dilakukan oleh kepala sekolah TK Islam Mutira Bunda yang berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat terhadap penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan bendahara sedangkan pengawasan secara eksternalnya tidak dilakukan oleh tim manajemen BOP PAUD/TK kabupaten/kota padahal ini adalah kewajiban tim manajemen untuk dapat mengawasi dana BOP yang telah diberikan kepada TK yang sudah mendapatkan dana tersebut. Pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan

pembiayaan juga disampaikan oleh Cooper & Nisonoff , menyatakan bahwa sistem manajemen keuangan yang efektif harus meliputi pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin ketepatan dan mencegah penyelewengan dalam penggunaan dana.

Jika pengawasan dan pertanggungjawaban di sekolah tidak dilakukan dengan benar, maka dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan. Yang nantinya berdampak pada kualitas pendidikan. Karena, dana tersebut tidak dipergunakan sebagai upaya peningkatan kualitas sekolah. pemisahan tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana sehingga rentan terjadinya penipuan, pencurian, dan kolusi sehingga besar kemungkinan akan terjadinya korupsi atau penyelewengan dana

Berbagai sumber perolehan dana penyelenggaraan PAUD umumnya berasal dari: 1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota); 2) masyarakat seperti dari tokoh masyarakat, instansi terkait, dunia usaha dan industri; dan 3) lembaga PAUD sendiri. Sumber dana penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD secara langsung seperti dana bantuan rintisan PAUD atau dana PAUD Percontohan. Selain itu, dana dari Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD melalui pemerintah provinsi yang biasanya disebut dana dekonstrasi (dekon). Dana dekonstrasi berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonstrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonstrasi yang diterima lembaga PAUD, antara lain bantuan rintisan PAUD, PAUD Percontohan tingkat kecamatan/desa, dan orientasi teknis pembelajaran PAUD. Selanjutnya, pemerintah provinsi melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberi bantuan dana penyelenggaraan PAUD dengan jumlah relatif kecil, karena keterbatasan kemampuan pemerintah

provinsi dalam penganggaran bidang pendidikan. Umumnya bantuan dana tersebut diterima lembaga PAUD berupa alat permainan edukatif.

Bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota melalui APBD relatif masih kurang dan umumnya diberikan kepada lembaga PAUD untuk membayar honor insentif pendidik PAUD dan alat permainan edukatif. Masyarakat ikut berperan sebagai sumber dana bantuan penyelenggaraan PAUD. Tokoh masyarakat memberi bantuan dalam bentuk tenaga, uang, dan barang. Instansi terkait seperti dinas kesehatan melalui Posyandu memberi bantuan pemberian vitamin, pemeriksaan gigi, dan kesehatan anak. Dunia usaha dan industri memberi bantuan dana kepada beberapa lembaga PAUD berupa pemberian alat permainan edukatif.

Dari lembaga PAUD dana untuk penyelenggaraan PAUD diperoleh dari orangtua peserta didik dan umumnya berupa uang dan tenaga. Selain itu, ada beberapa lembaga PAUD memperoleh dana dari penjualan alat permainan edukatif yang dibuat sendiri oleh pendidik PAUD. Dari data yang dijangkau telah ditemukan bahwa dana dari Pemerintah (Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI) dan dari pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi) diberikan langsung ke lembaga-lembaga PAUD. Alokasi bantuan dana dari pemerintah tersebut belum merata dan masih relatif kecil, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penganggaran bidang pendidikan, terutama PAUD. Jenis yang dianggarkan meliputi dana rintisan, dana penguatan, dana kelem-bagaan, pengadaan sarana prasarana, insentif tutor/pendidik, PAUD percontohan, dan dana kemitraan. Untuk memperoleh dana tersebut, lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Mekanisme pendanaan lazimnya ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut: 1) dinas pendidikan kabupaten/kota menerima pemberitahuan alokasi dana penyelenggaraan PAUD dari direktorat PAUD dan dinas pendidikan propinsi; 2) dinas pendidikan

kabupaten/kota memberitahukan kepada semua lembaga PAUD dan mendorong lembaga PAUD untuk mengajukan proposal; 3) menyeleksi proposal-proposal yang diajukan oleh lembaga PAUD, dan menyampaikan proposal yang lolos seleksi ke Direktorat PAUD dan ke dinas pendidikan propinsi sesuai jenis dan bentuk pendanaan masing-masing; dan 4) meminta laporan berkala penggunaan dana sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan dari lembaga-lembaga PAUD penerima dana bantuan. Setelah proposal diterima oleh Pemerintah Pusat, kemudian dilakukan penilaian terhadap proposal untuk mengkaji kelayakan lembaga pengusul termasuk diadakannya kunjungan atau verifikasi ke lembaga PAUD. Bagi lembaga yang telah dinilai dan ditentukan layak menerima dana bantuan, maka dilakukan penandatanganan penerimaan dana PAUD (MoU) dan dana tersebut akan langsung diberikan ke lembaga PAUD.

Pengelolaan keuangan di sekolah harus menjadi perhatian dalam pemanfaatannya secara efektif dan efisien. Sehingga, kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sekolah harus memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan sekolah. selain itu, kepala sekolah juga memiliki wewenang untuk mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

Leonarti, Suyatmini & Namiro, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tujuannya ialah mengoptimalkan pembiayaan pendidikan dalam rangka menghasilkan produktivitas pendidikan.

Namun, ada kalanya dalam pengajuan proposal tidak ditempuh dengan cara yang lazim karena adanya kedekatan pribadi dengan birokrat di pusat, sehingga lembaga PAUD pengusul tersebut dalam pengajuan proposal hanya sebagai formalitas saja. Kecenderungan dengan pola seperti ini lebih memberi peluang bagi PAUD untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya, pemberian bantuan tersebut

langsung dikirim ke lembaga PAUD, sehingga dinas pendidikan kabupaten/kota tidak mengetahui jumlah dana PAUD yang bersumber dari Pusat.

3. Evaluasi Dan Pertanggungjawaban pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini

Evaluasi pendidikan merupakan suatu proses dimana dapat memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.⁵¹

Lembaga Pendidikan anak Usia Dini wajib menyampaikan laporan dan evaluasi di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan lembaga yang harus dilakukan setiap semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini setiap semester yang akan dijadikan laporan kepada pihak-pihak yang terlibat dan pengelolaan lembaga atau kepada sumber dana. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk mengetahui semua pengelolaan anggaran yang telah direncanakan apakah sesuai dengan tujuan atau peruntukannya. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS), masing-masing pengelola program BOS di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS.

Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses Akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan Ekonomi, serta menggambarkan kinerja Keuangan Perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak serta merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi selama periode tertentu.

⁵¹ Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosda,2010), Cet.2 Hal 5-6

Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Undang-Undang, dan membuat suatu keputusan. Laporan keuangan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kuwitansi/bukti penerimaan, dan Kuwitansi/bukti pembayaran yang di keluarkan oleh sekolah.⁵²

Manajemen pembiayaan sekolah meliputi pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam pengelolaan biaya penyelenggaraan sekolah harus menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban pihak sekolah dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Di TK Islam Mutira Bunda untuk pertanggungjawaban dana BOP hanya memberikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) setelah dana itu diterima sedangkan untuk biaya sekolah yaitu SPP pihak sekolah tidak membuat pertanggungjawaban secara tertulis kepada para wali murid hanya saja sebelum uang SPP di tetapkan pihak sekolah

Menurut Bafadal, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan keuangan di taman kanak-kanak, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) pengawas mempelajari rencana anggaran yang telah disusun oleh taman kanak-kanak, dan (2) pengawas mempelajari semua catatan yang ada di dalam buku kas serta bukti-bukti sahnya (kwitansi maupun faktur). Hal-hal yang dipertanyakan dalam mempelajari buku kas dan bukti-buktinya meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵² (Sumber : petunjuk teknis bantuan operasional sekolah).

1. Apakah semua pemasukan keuangan telah sesuai dengan rencana anggaran?
2. apakah semua pengeluaran keuangan telah sesuai dengan rencana anggaran?
3. Apakah semua bukti (kwitansi dan faktur) pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada sah?

Sedangkan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk tanggungjawab keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal lembaga pendidikan. Menurut Arwildayanto dkk, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan, satu tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan yang ditujukan diantaranya adalah kepala dinas pendidikan, kepala badan administrasi keuangandaerah, dinas pendidikan daerah dan lain-lainnya.⁵³

C. Penelitian Relavan

Penelitian Relavan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah di buat oleh seseorang dan sudah dianggap relavan. Penelitian ini mempunyai keterkaitan dalam hal judul penelitian dan topik yang diteliti dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang kita lakukan. Penelitian relavan berarti deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti.

Penelitian relvan ini mempunyai kegunaan yaitu untuk mendorong atau mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relavan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini.

Dalam Penelitian Ini Penulis Merujuk Pada Peneltian Sebelumnya Pada Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini di TK Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong

⁵³ Nur Komariah, Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan, Jurnal Al-Afkar, Vol. Vi, No. 1, April 2018, Hlm 74

Kabupaten Lampung Barat berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Penelitian Relavan

Nama penulis	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
Siti Fatimah judul penelitian : “Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di RA Mambaul Ulum Sumurgug Montong Tuban”.2020,	Meneliti Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Beliau Meneliti Juga Tentang Mutu Pendidikan Sedangkan Penelitian Saya Hanya Mengacu Pada Pembayaan Pendidikannya Aja.
Syamsudin, “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Asahan” (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009)	Meneliti Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Implementasi pembiayaan di sekolah	Beliau Meneliti Pembiayaan Guna Memenuhi Mutu Belajar Yang Dilakukan Melalui Proses Mengajar
Ferdi W.P	Meneliti Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Beliau Meneliti Tentang Pembiayaan Pendidikan Yang Berdasarkan Kajian Teoritis Meliputi Gaji Guru
Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Jurnal Manajemen Pembiayaan)	Meneliti Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Beliau Meneliti Trentang Pembiayaan Yang Didasari Didalam Perspektif Islam

Dari tabel diatas dapat diperjelas bahwa Siti fatimah (2020) beliau meneliti tentang implementasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA mambaul ulum sumurgug montong tuban. Hasil dari penelitian beliau adalah menunjukkan bahwa a) perencanaan manajemen pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada

plafon anggaran, tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah maka harus melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pendapatan tersebut berasal dari masyarakat maka perencanaan manajemen pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang primer sampai kebutuhan sekolah tersier tetapi tidak melebihi aturan. B) kegiatan pelaksanaan pembiayaan tersebut meliputi 2 kegiatan besar yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Kegiatan dan pengendalian atau evaluasi meliputi kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembiayaan di awal dan pelaksanaannya.⁵⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin yang berjudul Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Asahan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian biaya pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap proses maupun mutu hasil belajar.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdi W.P yang berjudul Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis hasil dari penelitian ini adalah pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah dipengaruhi oleh kenaikan harga (rising price), perubahan relative dalam gaji guru (teacher's salaries), perubahan dalam populasi dan kenaikanya prosentasi anak sekolah (negeri), meningkatnya standar pendidikan (educational standart), meningkatnya usia anak yang

⁵⁴ Siti Fatimah "Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di RA Mambaul Ulum Sumurgug Montong Tuban".2020,Hal.27

⁵⁵ Syamsudin, "Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Asahan" (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009)

meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (higher education).

Faktor-faktor peningkatan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kurun waktu tertentu.⁵⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir yang berjudul *manajemen pembiayaan pendidikan dalam perspektif islam*. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pendidikan formal yang diselenggarakan Negara khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari Negara (baitul mal). Dalam sejarah, pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum (termasuk pendidikan), berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas Negara).⁵⁷

Dari pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaan diantaranya adalah pada obyek, penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian, penelitian yang penulis lakukan yaitu implementasi manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini yang penulis fokuskan yaitu dengan judul “Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Lampung Barat” Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaan diantaranya adalah pada obyek, penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian, penelitian yang penulis lakukan yaitu implementasi manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini yang penulis fokuskan yaitu dengan judul “Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Tk Islam Mutiara Bunda Sidorejo Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”

⁵⁶ Ferdi W.P, Op.Cit , H. 575

⁵⁷ Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Jurnal Manajemen Pembiayaan, Vol.8 No.2, Desember 2013)

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hermino, Assesment Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comphrehensive Multilevel Planning, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Islam, *Jurnal At-Ta'dibb, Vol.8 No.2,2013*
- Ahmad, Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Jurnal Manajemen Pembiayaan, Vol.8 No.2, Desember 2013)
- Akhdon. Manajemen Pembiayaan Pendidikan, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya 2015)
- Amirul, Mukminin/Pg-Paud/Fip/Unnes'2011
- Ardy, Novan. "Manajemen Paud Bermutu" (Yogyakarta: Gava Media, 2015)
- Arifin, Zainal. Evaliasi Pembelajaran, (Bandung: Rosda,2010).
- Asmani, Jamal M. Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: Diva Press, 2012)
- B.Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2015)
- Bafadal, Ibrahim. Dasar-Dasar Manajemen Dan Supervisi Taman Kanak-Kanak.(Pt. Bumi Aksara
- Bastian ,Indra. Akuntansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Bogdan,Robert, Taylor, Steven J. ;Devault, Marjorie. Intrroduction To Qualitative Researchmethods: A Guidebook And Resource. Jhon Wiley & Sons, 2015
- Bunginm, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Zekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Creswell,J.W. *Qualitative Inquiry And Reseach Design: Choosing Among Five Approaches, 3rd Ed, (Ca:Sage,2007)*
- Dadang, Suhardan. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan(Bandung: Alfabeta,2013)
- Daryanto, M. Farid. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jogjakarta: Gave Media, 2013)

- Dewi Utari, Dkk., Manajemen Keuangan: Edisi Revisi Kajian Praktik Dan Teori Dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Egi, Evrian Firmansyah And Wardana. "Penguatan Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Didesa Garawangi Dan Desa Rancaputat Kabupaten Majalengka", Jurnal Penelitian 10 Nomor 2 (2016)
- Enny Pudjiastuti , S. Husnan Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015)
- Erfy, Melani Lalapanda. Evluasi Implementasi Program Bantuan Biaya Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, Vol.3 No.2 Maret 2019
- Fatimah , Siti. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Ra Mambaul Ulum Sumurgug Montong Tuban".2020
- Fattah, Nanang. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2006)
- Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000)
- Fattah, Nanang. Pembiayaan Pendidikan, Landasan Teori Dan Studi Empiris, Jurnal Pendidikan Dasar Nomor 9, April 2008
- George R. Terry, Leslie W. Rue, Principles Of Manajemen, Alih Bahasa G.A Ticoalu (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fb Ugm, 2014)
- Husaini, Usman. Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2006)
- Komariah, Nur. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan, Jurnal Al-Afkar, Vol.Vi, No.1, April 2018
- Kompri, Manajemen Pendidikan 1, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- La Hewi, Jurnal Smart Paud, Komersialisasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dikota Kendari, Vol.3, No.1, Januari 2020
- Lia Yuliana, Suharsimi Arikunto. Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditiya Media, 2008)

- Marcia, Millon, Et.Al., Finance: Application & Theory, (New York: Mc Graw Hill Education, 2015)
- Milles Matthew B.; Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage, 1994
- Mufhin, M. Hizbul. Administrasi Pendidikan: Teori Dan Aplikasi, (Klaten: Cv Gema Nusa, 2015)
- Muhaimin, "Manajemen Pendidikan" *Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010)
- Nilawati, Tadjuddin. Desain Pembelajaran Anak Usia Dini, Teori Dan Praktik Pembelajaran anak Usia Dini, (Aura Publishing : Januari 2015)
- Nurdin, Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002)
- Oxford Advance Learning Dictionary Of Curnel English As Hjomby (Oxford University, Press, 995)
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Rohiat, Manajemen Sekolah, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2012)
- Saefullah, Manajemen pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Siagaan,, Sondang P. Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007)
- Syamsudin, "Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Asahan" (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009)
- Thohirin. Metode Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling. (Pt. Rajagrafindo Persada, 2013)
- Tillar, Standarisasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006)
- Udin Syaefudin Sa'ud, Abn Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu Mpendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2010)

Undang-Undang Ri , 2006, No. 19 Tahun 2005 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Sisdiknas), Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Sisdiknas Ri Nomor 20 Tahun 2003,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

